

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Pernyataan Keaslian Isi Skripsi	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan Skripsi	iii
Lembar Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi - vii
Daftar Isi	viii - ix

BAB I - PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1 – 10
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Metodologi Penelitian	11 – 17
E. Sistematika Penelitian	17 – 19

BAB II – TINJAUAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Mahkamah Konstitusi.....	20 – 27
B. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	28 – 31
C. Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi	31 – 34
D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah	34 – 44

E. Hukum Acara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi	44 – 47
F. Rezim Pemilu	48 – 61
BAB III – TINJAUAN UMUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN	
A. Profil Kota Tangerang Selatan	62 – 65
B. Komisi Pemilihan Umum	65 – 71
C. Pemilihan Umum Kepala Daerah	71 – 78
BAB IV – KEWENANGAN DAN PROSEDUR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN	
A. Pemilihan Umum Kepala Daerah	79 – 90
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah	90 – 96
C. Hukum Acara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi	96 – 101
D. Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 (209-210/PHPU.D-VIII/2010)	101 – 114
BAB V – PENUTUP	
A. Kesimpulan	115 – 116
B. Saran	117 – 118
Daftar Pustaka	119 – 123
LAMPIRAN :	

1. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010.
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.